



**PEMERINTAH KOTA  
PADANG PANJANG**

# LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**



**20  
25**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG**



## PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ( 0752 ) 84506 Padang Panjang 27118  
Email : itkopadangpanjang@gmail.com

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang Panjang, 30 Maret 2026

Inspektur, -

  
Ferino Romjiko, S.STP.,M.Si.  
Pembina IV.a/ Nip.198602102006021001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunianya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat dituntaskan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk media informasi yang berisikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada publik atas kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun 2025, sekaligus sebagai pedoman bagi upaya perbaikan berkesinambungan guna meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG



**HARRY RIZKA PERDANA, S.IP, M.Si**  
NIP. 19871004 200701 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang persandian, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

Sesuai dengan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2025-2029 “PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH, Dinas Komunikasi dan informatika berperan dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yakni *“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif”* dengan sasaran *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif*. Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dengan indikator kinerja hasil evaluasi indeks SPBE/Pemerintahan Digital.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dengan menggunakan indikator kinerja indeks SPBE/Pemdi.
3. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah dengan menggunakan indikator kinerja hasil penilaian keterbukaan informasi publik.
4. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan menggunakan indikator kinerja indeks pembangunan statistik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini, merupakan bentuk akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama tahun berkenan. Tahun 2025 merupakan masa transisi terkait dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029, sehingga penyusunan LKJIP ini mengacu kepada Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk Tahun 2025.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis melalui 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2025 ini cukup baik, dimana 3 (tiga) indikator terealisasi sesuai target dan hanya satu sasaran strategis yang belum mencapai target terkait dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah terkait dengan indikator nilai evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, namun tetap dengan capaian yang sangat baik.

Tingkat realisasi anggaran pada tahun 2025 cukup tinggi, dimana dari pagu pada perubahan anggaran sebesar Rp7.678.757.686, dapat terealisasi sebesar Rp7.188.976.478- atau mencapai 93.62%. Terkait dengan capaian program, dari pelaksanaan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan selama tahun 2025 rata-rata terealisasi dengan sangat baik atau mencapai target.

Secara umum faktor pendukung untuk pencapaian indikator kinerja utama adalah adanya perbaikan tata kelola, dukungan pimpinan maupun adanya kolaborasi yang baik antara stakeholder terkait. Sementara untuk faktor penghambat berasal dari keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM dan ketersediaan anggaran terkait dengan pemenuhan kebutuhan Infrastruktur Teknologi.

Berdasarkan paparan di atas, terdapat berapa rekomendasi perbaikan kinerja kedepan diperlukan berupa optimalisasi tata Kelola, peningkatan kualitas SDM dan adanya komitmen penganggaran dalam rangka mewujudkan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.....	10
1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis.....	11
1.5 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat.....	15
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>21</b>
2.1 Rencana Strategis .....	21
2.1.1 Tujuan dan Sasaran.....	21
2.2 Perjanjian Kinerja.....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2025 .....</b>	<b>27</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	27
3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	28
A.1 Sasaran Strategis, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. ....	28
A.2 Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah .....	30
A.3 Sasaran Strategis 3, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital.....	33
A.4 Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan .....	36
3.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	41
3.1.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	44
3.1.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	47
3.2 Realisasi Anggaran .....	56
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
1. Kesimpulan.....	60
2. Saran .....	61

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan jenis kepegawaian	11
Tabel 1.2	Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon/Jabatan	11
Tabel 1.3`	Pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	12
Tabel 1.4	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	16
Tabel 1.5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	17
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026	23
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029	25
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	27
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Indikator Kinerja	28
Tabel 3.1.1	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	30
Tabel 3.1.2	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2025	30
Tabel 3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s/d Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra	30
Tabel 3.1.4	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	31
Tabel 3.1.5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2025	32
Tabel 3.1.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra	32
Tabel 3.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Tahun 2025 dengan standar nasional	33
Tabel 3.1.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Tahun 2025 dengan standar kota	34
Tabel 3.1.9	Prediket Indeks SPBE	34
Tabel 3.1.10	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	35
Tabel 3.1.11	Hasil Penilaian Indeks Domain Layanan SPBE Kota Padang Panjang	36
Tabel 3.1.12	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Srategis 3	36
Tabel 3.1.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Srategis 3 s/d Tahun 2024 dan target akhir Renstra	36
Tabel 3.1.14	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025 dengan Standar Nasional	37
Tabel 3.1.15	Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS	38
Tabel 3.1.16	Predikat Indeks Hasil EPSS	39
Tabel 3.1.17	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	39
Tabel 3.1.18	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	39
Tabel 3.1.19	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	39

Tabel 3.1.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 s/d Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra	40
Tabel 3.1.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 dengan Standar Nasional	41
Tabel 3.1.22	Perbandingan Realisasi Kinerja sasaran Strategis 4 dengan Standar Kota	41
Tabel 3.1.23	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Srategis 1	49
Tabel 3.1.24	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Srategis 2	52
Tabel 3.1.25	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Srategis 3	53
Tabel 3.1.26	Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Srategis 4	55
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran	56

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (performance-base management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam sistem akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwasanya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban formal bagi setiap Instansi Pemerintah guna mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2025 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan menyajikan informasi tentang rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan urusan wajib pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, yang berisi informasi mengenai tercapainya sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini adalah sebagai indikator dalam menilai keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus sarana evaluasi sekaligus memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan kinerja instansi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan

## **1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang. maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
  - a) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretariat;
  - a) Sekretariat yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian serta kelompok jabatan fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- c) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c terdapat kelompok jabatan fungsional dan atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
3. Bidang;
- a) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c , masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
    - Bidang Aplikasi, Informatika, dan Persandian
    - Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
4. UPTD;
- b) UPTD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### 1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Pelaporan.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

#### 1.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian program kegiatan bidang.
- b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian dinas.
- c. Pengoordinasian penyusunan analisis jabatan dan beban kerja.
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset dinas.
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan dinas.
- f. Pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas.
- g. Pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, system pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan dinas.
- h. Pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- i. Pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan dinas.
- j. Penatausahaan keuangan dinas.
- k. Pengelolaan perbendaharaan dinas.
- l. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan asset dinas.
- m. Pelaksanaan verifikasi pertanggung jawaban keuangan dinas.

- n. Penyusunan pertanggung jawaban keuangan dinas, dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sekretariat terdiri dari;

- Subbagian Umum dan Kepegawaian yang di kepalai oleh kepala Sub bagian umum dan kepegawian.
- Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan yang di kepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan.

### 1.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Aplikasi, Informatika, dan Persandian.

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan Aplikasi, Informatika, dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik pada layanan publik dan administrasi.
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait Aplikasi Informatika dan Persandian.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
- d. pengkoordinasian perencanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian.

- f. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis infrastruktur teknologi dan persandian.
  - g. pengkoordinasian perencanaan teknis layanan aplikasi.
  - h. pengkoordinasian pelaksanaan teknis layanan aplikasi.
  - i. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis layanan aplikasi.
  - j. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
  - k. pengkoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
  - l. peningkatan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi.
  - m. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.
  - n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
  - o. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian.
  - p. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian.
  - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

#### 1.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.

Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan

mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- d. pengkoordinasian perencanaan teknis pengelolaan informasi publik.
- e. pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengelolaan informasi publik.
- f. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan informasi publik.
- g. pengkoordinasian perencanaan teknis pengelolaan komunikasi public.
- h. pengkoordinasian pelaksanaan teknis pengelolaan komunikasi publik.
- i. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan komunikasi publik.
- j. pengkoordinasian perencanaan teknis dokumentasi dan hubungan media.
- k. pengkoordinasian pelaksanaan teknis dokumentasi dan hubungan media.
- l. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan dokumentasi dan hubungan media.
- m. pengkoordinasian perencanaan teknis urusan statistic.
- n. pengkoordinasian pelaksanaan teknis urusan statistic.
- o. pengkoordinasian pembuatan laporan dan evaluasi teknis urusan statistic.
- p. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan statistik sektoral yang mendukung pelaksanaan sistem statistik nasional.
- q. penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas.
- r. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.

- s. pengkoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- t. pengkoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- u. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- v. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik.
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

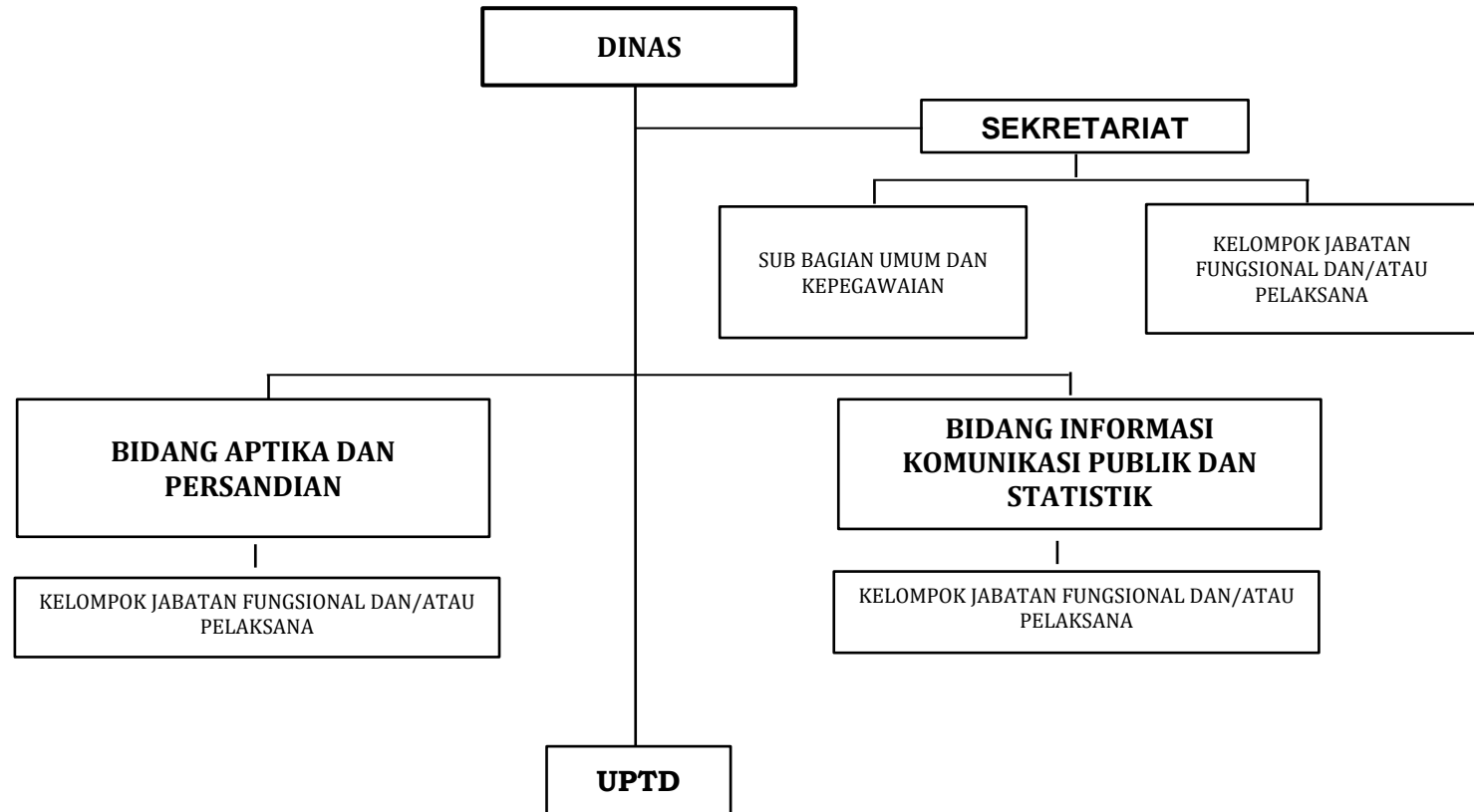
#### 1.2.5 UPTD

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas dibentuk UPTD. Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### 1.2.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.1  
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG



### 1.3 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Berdasarkan kondisi tahun 2025, Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjumlah 54 orang terdiri dari 27 orang PNS dan PPPK dan 27 orang THL. Adapun gambaran statistik pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan jenis kepegawaian**

No.	Uraian	Jenis Kepegawaian		
		PNS	PPPK	THL
1	Golongan IV	4 orang	-	-
2	Golongan III	17 orang	1 orang	
3	Golongan II	2 orang	3 orang	
4	Non Golongan	-	-	27 orang
	Total Pegawai	54 orang		

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari keseluruhan pegawai pada Dinas Kominfo seimbang antara THL sebesar 50%, serta PNS dan PPPK sebesar 50%. Hal ini dikarenakan banyaknya formasi jabatan teknis pada Dinas Kominfo yang belum diisi oleh ASN seperti tenaga jaringan dan tenaga liputan.

**Tabel 1.2**  
**Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon/Jabatan**

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV.a	1 orang
4	Jabatan Fungsional Keahlian	12 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	10 orang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2025, komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh jabatan fungsional baik keahlian sebesar 45% dan jabatan fungsional pelaksana sebesar 37%. Hal ini dikarenakan keberadaan pegawai yang berasal dari penyetaraan eselon IV dan pegawai PPPK yang langsung menempati jabatan fungsional keahlian.

**Tabel 1.3**  
**Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata II	5 orang
2	Strata I	12 orang
3	Diploma III	8 orang
4	SLTA	2 orang

Latar belakang pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan pendidikan didominasi Strata 1 atau Sarjana, selanjutnya adalah pendidikan Diploma III (teknis), Strata II, dan SLTA.

#### 1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Ada beberapa aspek strategis yang mempengaruhi perencanaan dan pencapaian kinerja OPD, yaitu:

##### A. Kekuatan (Strengths)

- Struktur organisasi yang jelas dan lengkap

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang E Government dan Teknologi Informasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, serta Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 37

Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

- Realisasi anggaran tinggi dan sesuai dengan prinsip value for money. Realisasi anggaran mencapai 93.62 %, menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana. Dinas Kominfo telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam pengelolaan anggaran.
- Secara umum, pencapaian sasaran strategis melalui 4 ( empat) indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2025 ini cukup baik, dimana 3 (tiga) indikator terealisasi sesuai target dan hanya satu sasaran strategis yang belum mencapai target terkait dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah terkait dengan indikator nilai evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, namun tetap dengan capaian yang sangat baik.

#### B. Kelemahan (Weakness)

- Minimnya kuantitas SDM, dan Kualitas SDM terutama yang berkompetensi dan Sertifikasi. SDM yang tersedia didominasi oleh THL, sementara ketersediaan PNS masih belum mencukupi kebutuhan sesuai peta jabatan yang tersedia, bahkan terdapat jabatan yang kosong pada fungsional statistisi dikarenakan satu-satunya SDM yang tersedia mengikuti tugas belajar. Selain itu juga jumlah tenaga teknis IT terkait dengan sandiman, programmer, desain grafis dan pengelola jaringan sangat terbatas.
- Alokasi anggaran untuk belanja perencanaan SPBE dan pemeliharaan infrastruktur tidak memadai.
  - Anggaran untuk penyusunan dokumen perencanaan SPBE sering mengalami refocusing sehingga beberapa dokumen perencanaan yang penyusunannya melibatkan pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan.

- Rendahnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur menjadikan penyelenggaraan SPBE tidak berjalan optimal, beberapa perangkat TI seperti videotron, videowall sudah tidak berfungsi maksimal dan seringnya terjadi serangan cyber terhadap keamanan informasi pemerintah kota.
  - Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang  
Terbatasnya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berdampak kepada operasional pelaksanaan kegiatan.
  - Pelatihan dan pengembangan SDM belum maksimal  
Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan kompetensi SDM TI, menyebabkan keterbatasan jumlah SDM yang kompeten dan tersertifikasi.
- C. Peluang (Opportunities)
- Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat dan tingginya komitmen pemerintah pusat dan kota akan percepatan transformasi digital di berbagai sector perlu didukung dengan ketersediaan kebijakan baik dalam hal regulasi maupun perencanaan.
  - kondisi geografis kota yang tidak terlalu besar sehingga memudahkan dalam optimalisasi penyelenggaraan SPBE dalam rangka transformasi digital terutama terkait dengan peningkatan layanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik.
  - Tingginya tuntutan publik terhadap layanan informasi publik yang akurat dan mudah diakses dan memiliki konten yang menarik.
  - Berkembangnya berbagai macam komunitas masyarakat yang memanfaatkan TIK dalam penyebaran informasi.
  - penyelenggaraan satu data berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- D. Ancaman (Threats)
- Sangat Cepatnya perkembangan teknologi dan informasi dan

komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat perlu segera di adaptasi dengan penyiapan regulasi dan ketersediaan SDM yang mumpuni.

- Tingginya serangan cyber attack sehingga perlu meningkatkan keamanan informasi.
- Dukungan anggaran dari Pemerintah Kota masih kurang memadai Keterbatasan anggaran untuk perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur menjadikan penyelenggaraan SPBE tidak berjalan optimal dan sering terjadinya cyber attack.
- Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM TI  
Minimnya kuantitas, dan jumlah ASN yang memiliki kompetensi dapat menghambat peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
- Tingkat pengetahuan/kapasitas SDM Aparatur dalam pengelolaan teknologi pada pelayanan publik dan pemerintahan masih belum sebanding dengan kemajuan teknologi informasi dalam kerangka e-government yang berkembang begitu pesat.
- Jumlah Tenaga Teknis IT yang didominasi THL juga menjadi ancaman karena sewaktu- waktu dapat terjadi kekosongan tenaga yang berpengaruh pada kinerja OPD.
- Berkembangnya berbagai komunitas informasi masyarakat, menjadi ancaman untuk terjadinya penyebaran berita/ informasi tidak valid/ hoaks, dan konten negatif.
- Kualitas data statistik sektoral akan berpengaruh sangat signifikan pada ketepatan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan.

### 1.5 Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Oleh Inspektorat

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024, diperoleh nilai sebesar 70,90 dengan predikat BB. Lebih lanjut terkait dengan rincian penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 4**  
**Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	21.60
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.10
4.	Evaluasi Internal	25	14.50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,90
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Adapun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 oleh Inspektorat Padang Panjang, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 5**  
**Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024**

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi	Link Bukti Dukung
	A. Perencanaan Kinerja								
	1 Penjenjangan kinerja masih dihubungkan dengan struktur organisnasi dan perogram/kegiatan <i>existing</i> . Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan <i>logical framework</i> dan belum sepenuhnya mengidentifikasi seluruh <i>critical success factor</i> atas pencapaian kinerja dalam proses penyusunannya bagaimana sebagaimana tahapan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, pada Bab II poin (2).	perbaikan pohon kinerja	1 dokumen	B01	Sekretariat/fungsional perencanaan	selesai	update perbaikan dan upload	-	<a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja</a>

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi	Link Bukti Dukung
	2 Tidak adanya rumusan <i>Crosscutting</i> dalam perencanaan kinerja, yaitu informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/tugas dan fungsi lain yang berkaitan.	Perbaiki Crosscutting	1 dokumen	B01	Sekretariat/fungsional perencanaan	selesai	update perbaikan dan upload	-	<a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pohonkinerja</a>
	B. Pengukuran Kinerja								
	1 Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan ( <i>Decision maker</i> ) dalam mengukur capaian kinerja terutama dalam memonitor capaian atas kinerja secara berkala.	Perumusan strategi dan kebijakan dalam rapat pengukuran kinerja	4 dokumen	B07, B01	Sekretariat/fungsional perencanaan	selesai	update perbaikan dan upload notulen pengukuran kinerja		<a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lainnya</a>
	2 Hasil pengukuran kinerja organisasi belum dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , perubahan strategi dan target kinerja, maupun pola pengembangan kompetensi dan								

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi	Link Bukti Dukung
	mutasi rotasi di Pemerintah Kota Padang Panjang.								
	3 Pengukuran kinerja belum dilakukan d-secara berkala.	pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan dan pelaporan renaksi setiap triwulan	4 dokumen	B01, B04, B07, B010	Kepala Dinas	proses	Identifikasi capaian program dan kegiatan yang di bawah target	-	<a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/monev_renaksi">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/monev_renaksi</a>
	4 Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	pengukuran kinerja untuk setiap level kinerja dilakukan setiap bulan dan terangkum dalam pelaporan renaksi setiap triwulan	4 dokumen	B01, B04, B07, B010	Kepala Dinas, Sekretaris, Kabid	proses	Identifikasi capaian program dan kegiatan yang di bawah target	-	<a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/monev_renaksi">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/monev_renaksi</a>

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi	Link Bukti Dukung
	C. Pelaporan Kinerja								
	1 Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya sesuai standar.	Menyusun dokumen pelaporan kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	1 laporan	B12	Sekretariat/fungsional perencana	proses	menyempurnakan sistematika laporan kinerja (LKJIP)	-	<a href="https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lk">https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/lk</a>
	2 Laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional ( <i>Benchmark</i> Kinerja).	Menyusun dokumen pelaporan kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	1 laporan	B12	Sub Bagian Keuangan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	proses	menyempurnakan sistematika laporan kinerja (LKJIP)	-	
	3 Laporan akuntabilitas kinerja belum menyajikan informasi terkait efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Menyusun dokumen pelaporan kinerja sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014	1 laporan	B12	Sekretariat/fungsional perencana	proses	menyempurnakan sistematika laporan kinerja (LKJIP)	-	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi	Link Bukti Dukung
	D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
	1 Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang namun belum seluruh rekomendasi ditindak lanjuti sesuai dengan saran tim evaluator.	telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	4 aplikasi	Setiap bulan	Sekretariat/fungsional perencana	proses	memakai Aplikasi ers menpan, Simbangda, SIPD, SIPKD, Simda	-	

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya. Dokumen perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih lanjut dikenal dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan sekaligus dokumen perencanaan kinerja yang berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada perencanaan kinerja tahun 2025 terjadi transisi dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang Panjang tahun 2025-2029 yang ditandai dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang definitif pada bulan Februari tahun 2025. Hal ini berdampak pada perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang pada awal tahun anggaran masih menggunakan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada RPD 2024-2026 menjadi Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada RPJM Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

##### **2.1.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari visi dan misi pembangunan, serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

**A. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian tujuan kedua “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Akuntabel” dan sasaran kelima “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Selanjutnya sasaran RPD tersebut sekaligus menjadi Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 dengan 2 (dua) sasaran Strategis sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks SPBE	3,00	3,10	3,20
		Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	2,60	2,80	3,00
		Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	2,80	3,00	3,20

Sumber data Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

## B. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Berdasarkan Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2025-2029 “PADANG PANJANG KOTA SERAMBI MEKAH YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARWAH, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan dalam mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yakni “*Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif*” dengan sasaran *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif*. Sasaran ini sekaligus menjadi tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika selama periode Renstra 2025-2029.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital dengan menggunakan indikator kinerja indeks SPBE/Pemdi.
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah dengan menggunakan indikator kinerja hasil penilaian keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan menggunakan indikator kinerja indeks pembangunan statistik.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Lebih lanjut tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan**  
**Renstra Tahun 2025-2029**

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Satuan	Target Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital	Nilai Indeks SPBE/Pemdi	Angka	3.16	1.89	1.99	2.10	2.21
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan	Angka	71	73.03	75.07	77.1	79.14
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Nilai Keterbukaan	Angka	81	82	83	84	85
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	3.82	3.82	3.82	3.82	3.82
	Nilai Aspek Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	Angka	na	1.72	1.83	1.94	2.05
Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik	Angka	1.94	2.8	2.8	3	3

Sumber data: Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai bentuk komitmen atas kinerja yang terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja merupakan jabaran dari pencapaian tujuan dan sasaran OPD

sebagaimana telah dimuat dalam Rencana Strategis. Penetapan target dalam Perjanjian Kinerja pada dasarnya sesuai dengan Rencana Strategis, namun untuk menjaga kesinambungan dan perbaikan kinerja dari capaian pada tahun sebelumnya dapat dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja.

Terjadinya transisi dokumen perencanaan, berimbas pada penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 dimana pada Perjanjian Kinerja awal mengakomodir Renstra 2024-2026 dan pada perubahan Perjanjian Kinerja diselaraskan dengan Renstra Tahun 2025-2029. Lebih lanjut Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025 dapat

Lebih lanjut ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kominfo Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Domain Layanan SPBE	3.90	1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	71.00
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Indeks Domain Pembangunan Statistik	3.00	2	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik pemerintah daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	81

SEBELUM				SESUDAH			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				3	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Indeks SPBE/Pe mdi	3.16
				4	Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Pemban gunan Statistik	1.94

Mengacu pada Renstra tahun 2024-2026, pada Perjanjian Kinerja awal terdapat 2 (dua) Sasaran Strategis yang sekaligus menjadi indikator kinerja utama dalam Perjanjian Kinerja, setelah ditetapkannya Renstra Tahun 2025-2029 terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama untuk 4 (empat) sasaran strategis. Penambahan indikator Kinerja Utama tersebut dengan ditambahkan 2 (dua) sasaran strategis baru terkait dengan penilaian AKIP dan Keterbukaan Informasi Publik.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2025

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025.

Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada formula berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja} = \text{Realisasi Kinerja} / \text{Target Kinerja} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Gagal

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah ditetapkan 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama untuk mendukung capaian 4 (Empat) Sasaran Strategis OPD. Pencapaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Strategis akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

### **3.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis**

#### **A.1 Sasaran Strategis, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Instansi pemerintah termasuk perangkat daerah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi melalui dokumen perencanaan dan pelaporan yang terukur secara periodik.

Pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk menilai komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan penggunaan anggaran efisien, terukur, serta berorientasi hasil (*result-oriented*).

Dari penilaian AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang untuk kinerja tahun 2025 didapat hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.1**

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kominfo	70.90	70.80	99.85

Sumber : LHE AKIP Dinas Kominfo Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi tersebut dari target nilai sebesar 70.90, Nilai AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang baru terealisasi sebesar 70.80 (predikat BB) atau dengan capaian 99.85 % atau belum mencapai target kinerja.

**Tabel 3.1.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kominfo	na	70.90	na	70.90	70.80	99.85

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Dibandingkan realisasi pada tahun 2024, terjadi penurunan realisasi sebesar 10% pada hasil evaluasi penilaian AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.

**Tabel 3.1.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Kominfo	70.80	79.14	89.46

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 dengan nilai

sebesar 79.14, capaian kinerja sudah mencapai 89.46% dari target Renstra pada tahun 2029.

## **A.2 Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah Kota Padang Panjang memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di seluruh level pemerintahan. Keterbukaan informasi dipandang sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kebijakan ini, pemerintah tidak hanya berupaya memberikan akses informasi yang luas dan merata, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh informasi yang benar, tepat waktu, serta mudah diakses. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Pengukuran kinerja untuk Sasaran Strategis Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi Informasi provinsi Sumatera barat. Dari rangkaian penilaian yang dilakukan pada tahun 2025 didapat hasil sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.4**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	81	92,09 (informatif)	114%

Sumber : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, 2025

Berdasarkan evaluasi tersebut dari target nilai 81 Kota Padang Panjang mampu meraih nilai 92.09 (predikat informatif) dan menempati nomor urut kelima dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dengan capaian kinerja sebesar 114 %.

Meskipun pada beberapa tahun terakhir indikator ini tidak menjadi target capaian Renstra, namun dikarenakan penilaian yang dilakukan rutin setiap tahun maka untuk perbandingan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	%Capaian
1.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	94	96,90	103%	na	80,4	na	81	92,09	114%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Hasil evaluasi penilaian keterbukaan informasi publik Kota Padang Panjang selama beberapa tahun terakhir cukup fluktuatif dimana pada tahun 2023 sudah mencapai perolehan nilai sebesar 96.90 namun mengalami penurunan pada tahun 2024 dan kembali naik di tahun 2025.

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	92,09	85	108%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 dengan nilai sebesar 85, capaian kinerja sudah mencapai 108% atau realisasi tahun 2025 sudah melewati target akhir Renstra.

**Tabel 3.1.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Tahun 2025**  
**dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Nasional	% Capaian
1.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	92,09	66.43	138

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Pada tahun 2025 rata-rata perolehan nilai keterbukaan informasi publik untuk tingkat nasional adalah sebesar 66.43. Dibandingkan dengan nilai rata-rata nasional, realisasi nilai keterbukaan informasi publik Kota Padang Panjang sudah mencapai 138% atau berada diatas rata-rata.

**Tabel 3.1.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 s/d Tahun 2025**  
**dengan Standar Kota**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Kota	% Capaian
1.	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	92,09	83,57	110

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Perbandingan capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik dilakukan dengan standar nilai yang didapat oleh kota lain, dalam hal ini menggunakan rata rata realisasi nilai kota di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebesar 85,07 artinya perolehan nilai indeks Informasi Publik Kota Padang Panjang masih berada diatas nilai rata-rata kota yang ada di Sumatera Barat.

### A.3 Sasaran Strategis 3, Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital

Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah kunci mewujudkan *good governance* yang transparan, akuntabel, dan efisien. Melalui digitalisasi, pelayanan publik menjadi lebih cepat, birokrasi lebih efisien, dan partisipasi masyarakat meningkat. Agar tujuan pelaksanaan SPBE dapat tercapai sebagaimana mestinya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala guna mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah. Untuk menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Pengukuran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan oleh Kementerian PANRB setiap tahunnya.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE dikelompokkan atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1.9**  
**Predikat Indeks SPBE**

Predikat Indeks SPBE		
No	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Kemenpan RB 2025

Indeks domain layanan SPBE merupakan salah satu dari 4 domain SPBE dengan bobot penilaian terbesar yakni 45,5 %. Domain layanan SPBE terdiri dari penilaian terhadap penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Indikator ini menjadi Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan

Informatika Kota Padang Panjang guna mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

Sehubungan dengan adanya proses/masa transisi dimana indikator SPBE bertransformasi menjadi Pemerintahan Digital (PEMDI), maka pada tahun 2025 tidak semua kota menjadi locus penilaian SPBE salah satunya kota Padang Panjang, sehingga realisasi pada indikator ini menggunakan hasil evaluasi Kemenpan RB pada tahun 2024. Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 3 Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.10**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target PK	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital	Indeks domain layanan SPBE	3,82	3.82	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

**Tabel 3.1.11**  
**Hasil Penilaian Indeks Domain Layanan SPBE Kota Padang Panjang**

Nama Indeks	Bobot	Nilai 2024
SPBE		3,16
Domain Layanan SPBE	45,5%	3,82
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	3,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	4,00

Sumber data : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal

Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai.

Pemerintah Kota Padang Panjang telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi. Aplikasi TPP juga menunjukkan fungsi transaksi, validasi, kemajuan status persetujuan data, dan analitik data yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK, mencerminkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan layanan administrasi.

**Tabel 3.1.12**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital	Indeks domain layanan SPBE	3,55	3,26	92	3,40	3,82	112	3,40	3,82	112

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja untuk indikator indeks domain layanan SPBE, dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan nilai realisasi sebesar 112%.

**Tabel 3.1.13**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital	Indeks domain layanan SPBE	3,82	3.82	100 %

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Target kinerja tahun 2025 ini ditetapkan sama dengan target Renstra, hal ini dikarenakan pengukuran indeks SPBE akan berakhir pada tahun ini dan selanjutnya pada tahun 2026 akan menggunakan indikator indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Untuk capaian pada tahun 2025 ini adalah sebesar 100% atau terealisasi sesuai dengan target Renstra.

**Tabel 3.1.14**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 3 s/d Tahun 2025 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Nasional	% Capaian
1.	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital	Indeks domain layanan SPBE	3,82	3,23	118

Sumber : Kemenpan RB (Hasil evaluasi Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Perbandingan capaian nilai indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang dengan standar rata-rata nasional dalam hal ini sebesar 118% dapat disimpulkan bahwa indeks domain layanan SPBE kota Padang Panjang sudah berada diatas rata rata nasional.

#### **A.4 Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan**

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Data statistik yang berkualitas dapat memberikan kerangka kerja pengambilan keputusan yang efektif, pembuatan kebijakan berbasis bukti, perancangan dan implementasi kebijakan nasional yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi efektivitas rencana dan program.

Kegiatan statistik sektoral dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat

Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
3. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.4.1**  
**Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS**

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 3.1.16**  
**Predikat Indeks Hasil EPSS**

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator. Evaluasi penyelenggaraan statistic sektoral dilaksanakan dalam 2 tahun sekali oleh BPS, sehingga untuk realisasi pada tahun 2025 Kota Padang Panjang masih menggunakan hasil EPSS Tahun 2024. Hasil EPSS Kota Padang Panjang pada tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1.17**  
**Nilai Indeks Pembangunan Statistik**

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	1,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,87
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,17
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,18
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,45
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>2,35</b>	<b>1,94</b>

Sumber : BPS (Hasil EPSS Kota Padang Panjang Tahun 2024)

**Tabel 3.1.18**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Domain Pembangunan Statistik	1.94	1.94	100%

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang 2024)

Berdasarkan hasil EPSS didapatkan hasil Indeks Pembangunan Statistik Kota Padang Panjang sebesar 1,94 atau masuk kategori cukup. Dibandingkan target pada tahun 2025, capaian untuk sasaran strategis ini sebesar 100% atau sesuai dengan target Renstra.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1.19**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Domain Pembangunan Statistik	na	2,61	Na	2,80	1,94	69,28	1.94	1,94	100

Sumber : BPS (Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kota Padang Panjang Tahun 2024)

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator indeks pembangunan statistik lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya yakni tahun 2023.

**Tabel 3.1.20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dan Target Akhir Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Domain Pembangunan Statistik	1,94	3.00	64.66

Sumber : BPS, 2025

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2029 dengan nilai 3.00, maka realisasi kinerja untuk indikator ini baru mencapai 60,62% dari target akhir Renstra.

**Tabel 3.1.21**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 dengan Standar Nasional**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	% Capaian
1.	Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Domain Pembangunan Statistik	1,94	2,35	82,55%

Sumber : BPS, 2025

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Statistik dibanding dengan standar rata-rata Nasional sebesar 2,35 diperoleh capaian sebesar 82,55% atau dibawah standar nasional.

**Tabel 3.1.22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 4 dengan Standar Kota**

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Rata-rata Kota	% Capaian
1.	Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks domain Pembangunan Statistik	1,94	2,51	77,29%

Sumber : BPS, 2025

Untuk perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan standar rata-rata nilai perolehan Kota yang ada di

Indonesia adalah sebesar 2,35 diperoleh capaian sebesar 77,29% atau dibawah standar nilai rata-rata Kota.

### **3.1.2 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Berdasarkan gambaran capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran strategis, dapat dianalisa beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, lebih lanjut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### ***A. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator nilai AKIP Dinas Komunikasi Informatika.***

Dari gambaran perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis, secara keseluruhan SAKIP di Dinas Komunikasi dan Informatika sudah terlaksana dengan baik dengan nilai 70.80 (BB), namun belum mencapai target dengan capaian kinerja 99,9%. Beberapa faktor penghambat sehingga capaian kinerja belum terealisasi secara maksimal, diantaranya :

1. Belum sempurnanya dokumen penjenjangan kinerja dan crosscutting OPD.
2. Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam organisasi.
3. Masih terdapatnya indikator kinerja yang belum sesuai target.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja di masa yang akan datang, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Perbaiki tatakelola SAKIP OPD terutama yang berkaitan dengan perencanaan dan pengukuran kinerja.
2. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja dalam menentukan strategi dan kebijakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
3. Menindaklanjuti semua hasil LHE AKIP.

#### ***B. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah***

*dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik.*

Berdasarkan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis, perolehan nilai keterbukaan informasi publik di Kota Padang Panjang adalah sangat baik bahkan melampaui target Renstra, beberapa faktor pendukung capaian kinerja tersebut diantaranya adalah:

1. Optimalnya pengelolaan dan kelengkapan informasi pada website
2. Kesiapan data dukung yang akurat dan terdokumentasi dengan baik,
3. Efektifitas koordinasi dengan PPID pelaksana (OPD)
4. Komitmen pimpinan terhadap keterbukaan informasi publik

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja di masa yang akan datang, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan diantaranya :

1. Optimalisasi pengelolaan website [ppid.padangpanjang.go.id](http://ppid.padangpanjang.go.id).
2. Peningkatan skalabilitas dan kolaborasi diseminasi informasi dengan PPID Pelaksana (OPD).

*C. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Digital dengan Indikator Indeks Domain Layanan SPBE.*

Secara umum realisasi kinerja untuk indikator indeks domain layanan SPBE adalah sesuai dengan target atau dengan capaian 100%. Beberapa faktor pendukung dalam keberhasilan capaian kinerja tersebut, antara lain adalah :

1. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi. yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang Panjang
2. Menguatnya koordinasi dan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengkomunikasikan

/mengkoordinasikan tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja.

Sementara itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi, diantaranya :

1. Perlunya komitmen, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan SPBE sebagai program strategis Nasional dan Daerah antara pimpinan dan stakeholder terkait.
2. Perlunya penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan Smart City dan Arsitektur SPBE.
3. Perlunya penyusunan regulasi/kebijakan terkait tatakelola pengamanan informasi pemerintah daerah.
4. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM TI dan persandian.
5. Komitmen anggaran untuk penyediaan infrastruktur TI dan pengamanan informasi sesuai dengan kebutuhan.

*D. Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat Diandalkannya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Indikator Indeks Domain Pembangunan Statistik.*

Capaian kinerja untuk indikator ini sudah mencapai 100%, namun nilai indeks pembangunan statistik kota Padang Panjang masih berada pada kriteria cukup. Beberapa faktor pendukung terhadap capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya aplikasi [satudata.padangpanjang.go.id](http://satudata.padangpanjang.go.id) untuk memudahkan pengelolaan data statistic sectoral di Kota Padang Panjang.

Sebagai rekomendasi agar capaian kinerja sasaran strategis ini dapat meningkat, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

1. Perlu disusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral pada

Pemerintah Kota Padang Panjang yang mengatur tentang kaidah dari semua aspek penyelenggaraan statistik sektoral.

2. Perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang lebih intens terhadap penyelenggaraan statistik sektoral melalui Forum Satu Data Kota Padang Panjang
3. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Statistisk/Pengelola Data.

### **3.1.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran strategis juga didukung adanya efisiensi penggunaan Sumber Daya yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, diantaranya :

1. Efisiensi Sumber Daya Manusia
  - Komposisi dan Kualifikasi SDM

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 54 orang pegawai yang terdiri dari 27 orang ASN dan 27 orang THL/PPPPK Paruh Waktu dengan mayoritas latar belakang Pendidikan S1 dan Diploma III, kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas pegawai sudah mencukupi dan sebagian besar pegawai memiliki kapasitas yang cukup matang dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- Permasalahan SDM

Keunggulan :

- a. Struktur organisasi cukup lengkap dengan pembagian tugas yang jelas dalam bidang teknis.
- b. Kualifikasi pendidikan cukup baik, dengan mayoritas pegawai berpendidikan tinggi.

Kelemahan :

- a. Keterbatasan jumlah tenaga teknis terutama yang memiliki kemampuan IT seperti Design Grafis, Programmer, Sandiman, dan Jaringan yang sebagian besar masih berstatus THL/PPPK

Paruh Waktu.

- b. Keterbatasan tenaga yang berkompetensi dapat menurunkan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
- c. Minimnya program pelatihan dan peningkatan kompetensi berdampak pada kapabilitas ASN Dinas Komunikasi dan Informatika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- Rekomendasi untuk meningkatkan Efisiensi SDM/Strategi Perbaikan:
  - a. Meningkatkan jumlah pegawai berkompetensi melalui diklat baik secara online maupun offline yang dilaksanakan Lembaga Kementerian maupun Pemerintah Daerah.
- 2. Efisiensi Sumber Daya Keuangan
  - Alokasi dan Realisasi Anggaran
    - a. Total Anggaran Belanja sebesar Rp. 11.737.042.929,00 dan 93,95% telah terealisasi, terdiri dari :
      - b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Anggaran Rp. 5.105.152.286 terealisasi sebesar Rp. 4.736.198.245 atau 91.91%
      - c. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Anggaran sebesar Rp. 1.204.723.400 terealisasi sebesar Rp. 1.149.662.150 atau 96%.
      - d. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan Anggaran sebesar Rp.1.359.527.000 terealisasi sebesar 95%
      - e. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan Anggaran sebesar Rp. 5.505.000 terealisasi sebesar 80%
      - f. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 3.850.000 terealisasi sebesar 75%.
    - Permasalahan Anggaran

Keunggulan :

- a. Total realisasi anggaran mencapai 93,62%, menunjukkan efektivitas dalam perencanaan dan penggunaan dana.
- b. Program prioritas/unggulan berjalan sesuai dengan rencana.

Kelemahan :

- a. Porsi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi masih rendah sehingga beberapa infrastruktur tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti Videotron dan Videowall Command Centre.
  - b. Minimnya anggaran untuk pelatihan dan pengembangan SDM.
- Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Anggaran

Strategi Perbaikan :

- a. Mendorong adanya komitmen penganggaran untuk peningkatan kualitas infrastruktur strategis dalam penyelenggaraan SPBE.
- b. Mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN.
- c. Optimalisasi efisiensi belanja operasional

Efisiensi Sarana dan Prasarana

- Kondisi Sarana dan Prasarana
- g. Terbatasnya ketersediaan peralatan kantor dan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, seperti laptop, printer, kamera dan lain-lain.
  - h. Terbatasnya kendaraan dinas yang dapat berfungsi dengan baik dalam mendukung mobilitas dan operasional layanan.
  - i. Anggaran pemeliharaan gedung kantor yang masih minim sehingga belum mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan representatif.
  - j. Terbatasnya infrastruktur TI yang dapat berfungsi dengan baik karena terbatasnya anggaran pemeliharaan dan pengadaan seperti Videotron dan Videowall Command Centre.

- k. Belum tersedianya infrastruktur strategis sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan SPBE seperti pengadaan server dan pengadaan firewall untuk pengamanan informasi pemerintah daerah.
- Permasalahan Sarana Prasarana  
Keunggulan :
  - a. Kebutuhan dasar operasional masih terpenuhi, meskipun terbatas.
  - b. Melaksanakan Kerjasama Kementerian Komunikasi dan Digital dalam memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) untuk mengurangi kapasitas server.Kelemahan :
  - a. Minimnya pengadaan peralatan dan biaya pemeliharaan mengakibatkan terbatasnya sarana dan prasarana operasional dan teknis kantor (termasuk infrastruktur SPBE) yang dapat berfungsi dengan baik dalam hal ini PC/laptop, kamera, mobil dinas, videotron dan Command Centre.
- Rekomendasi untuk Meningkatkan Efisiensi Sarana dan Prasarana Strategi Perbaikan:
  - a. Mengusulkan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan riil pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor
  - b. Melaksanakan kerjasama dengan kementerian terkait dalam rangka penggunaan infrastruktur ataupun layanan.

#### **3.1.4 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan

18 (delapan belas) sub kegiatan selama tahun 2025. Capaian dari masing-masing Program dan Kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika. Program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 11 (sebelas) sub kegiatan. Indikator Kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan target 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% atau sangat baik. Lebih lanjut realisasi kinerja program pendukung Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.23**  
**Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100%	100%	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 orang/bulan	392 orang/bulan	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	24 laporan	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	100%	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	2 unit	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	7 unit	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	1 unit	1 unit	100

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
	Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	54 unit	54 unit	100

2. Capaian kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik**, didukung oleh pelaksanaan 1 (satu) Program yakni Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Indikator Kinerja untuk Program ini adalah persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) dengan target sebesar 77% dan terealisasi sebesar 84.62% atau dengan capaian sangat baik sebesar 110%. Realisasi Program ini secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.24**  
**Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survey)	77	84.62	110%
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	77	84.62	110%
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1. Terverifikasi dewan pers, 2. Terdaftar di dinas kominfo, 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	60	65	108%
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	12	12	100%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4	4	100%

3. Capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Digital, didukung oleh pelaksanaan 2 (dua) Program yakni: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dilaksanakan dengan indikator kinerja indeks domain tata Kelola SPBE dengan target sebesar 2.90 dan terealisasi sebesar 2,90 atau dengan capaian kinerja sangat baik sebesar 100 %. Sementara itu Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi adalah tingkat kematangan penerapan manajemen keamanan informasi dengan target sebesar 82 dan dapat terealisasi sebesar 78 atau dengan capaian kinerja 95.12%. Meski capaian untuk program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi termasuk sangat baik, namun belum memenuhi target kinerja hal ini terkait dengan belum terlaksananya assessment indeks keamanan informasi tahun 2025 oleh BSSN sehingga menggunakan capaian pada tahun sebelumnya (2024).

Realisasi kinerja program pendukung Sasaran Strategis 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.25**  
**Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	Nilai aspek keterpaduan layanan digital pemerintah	3,82	3,82	100%
	Indeks domain layanan SPBE			
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai aspek strategi dan rencana	3,82	3,82	100%
	Nilai aspek tata Kelola			

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
	Nilai aspek teknologi digital			
Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan e-government	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	23	23	100%
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4	4	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	82	78	95%
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	100%

4. Capaian kinerja untuk sasaran strategis **Meningkatnya Penyelenggaraan Satu Data** dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan), didukung oleh pelaksanaan .

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Indikator kinerja program ini adalah nilai domain prinsip SDI sebesar 2,5 dan terealisasi sebesar 2,5 atau dengan capaian kinerja 100%, nilai domain kualitas sebesar 2,3 dan terealisasi sebesar 2,3 atau dengan capaian kinerja 100%, nilai domain proses bisnis sebesar 2,7 dan terealisasi sebesar 2,7 atau dengan capaian kinerja 100%. Realisasi kinerja program pendukung Sasaran Strategis 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.26**  
**Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Strategis 4**

Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Indikator kinerja	Kinerja Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Layanan Statistik Akurat dan Dapat diandalkan	Indeks Domain Pembangunan Statistik			
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai domain prinsip SDI	2,50	2,50	100%
	Nilai domain berkualitas	2,30	2,30	100%
	Nilai domain proses bisnis	2,70	2,70	100%
Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	100%	100%	100%
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	100%

### 3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi kinerja keuangan pada tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Realisasi anggaran Dinas Kominfo pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran**

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SESUAI PK PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7.669.402.686	7.178.517.567	94,30%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.105.152.286	4.736.198.245	91,91%
A	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.595.998.294	3.422.312.051	95%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.595.998.294	3.422.312.051	95%
B	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	136.480.944	132.511.050	96,76%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	2.551.700	2.550.300	99,95%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.893.119	19.714.000	99%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.638.625	3.631.900	99,81%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.397.500	106.614.850	97%
C	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.306.800	12.225.000	92%
1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.306.800	12.225.000	92%
D	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.235.209.048	1.057.694.394	86%

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SESUAI PK PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.960.000	58.870.147	91%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.170.249.048	998.824.247	85%
E	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.157.200	111.455.750	90%
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.127.200	75.599.500	91%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.980.000	16.513.000	92%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	23.050.000	19.343.250	84%
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.204.723.400	1.149.662.150	96%
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.204.723.400	1.149.662.150	96%
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	73.655.900	44.753.500	61%
2	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	3.552.000	1.821.750	51%
3	Sub Kegiatan Realisasi Media	1.127.515.500	1.103.086.900	98%
III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.359.527.000	1.292.657.178	95%
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.359.527.000	1.292.657.178	95%

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN SESUAI PK PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.685.000	11.790.480	80%
IV	URUSAN STATISTIK	5.505.000	4.376.925	80%
H	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	5.505.000	4.376.925	80%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	5.505.000	4.376.925	80%
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5.505.000	4.376.925	80%
	URUSAN PERSANDIAN	3.850.000	2.895.000	75%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	3.850.000	2.895.000	75%
I	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.850.000	2.895.000	75%
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3.850.000	2.895.000	75%

Pada perubahan anggaran tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.678.757.686, untuk melaksanakan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan . Realisasi anggaran pada akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp7.188.976.478 atau mencapai 93.62%. Secara umum tingkat realisasi keuangan ini cukup tinggi meskipun masih

terdapat beberapa sub kegiatan yang rendah realisasi keuangannya namun secara kinerja sudah mencapai target. Beberapa hal yang mempengaruhi realisasi keuangan diantaranya adalah kondisi bencana alam pada akhir tahun 2025 sehingga perlu penyesuaian beberapa belanja seperti pelaksanaan rapat yang berpengaruh pada realisasi belanja makan minum, dan kebijakan terkait belanja pegawai.

## **BAB IV PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2025.

Tahun 2025 merupakan masa transisi terkait dengan pelaksanaan tahun pertama RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sesuai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Hal ini berimbas kepada penyusunan LKJIP yang didasarkan pada perjanjian kinerja awal yang didasarkan Renstra RPD 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja perubahan yang mengacu kepada Renstra 2025-2029. Sasaran strategis yang awalnya ditetapkan melalui 2 (Dua) indikator kinerja utama pada awal tahun 2025 mengalami penyesuaian menjadi 4 (empat) indikator sesuai dengan Renstra 2025-2029.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis melalui 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2025 ini cukup baik, dimana 3 (tiga) indikator terealisasi sesuai target dan hanya satu sasaran strategis yang belum mencapai target terkait dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah terkait dengan indikator nilai evaluasi AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, namun tetap dengan capaian yang sangat baik.

Tingkat realisasi anggaran pada tahun 2025 cukup tinggi, dimana dari pagu pada perubahan anggaran sebesar Rp7.678.757.686, dapat terealisasi sebesar Rp7.188.976.478- atau mencapai 93.62%. Terkait dengan capaian program, dari pelaksanaan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 18 (delapan belas) sub kegiatan selama tahun 2025 rata-rata terealisasi dengan sangat baik atau mencapai target.

Terdapat beberapa faktor pendukung untuk pencapaian indikator kinerja utama adalah adanya perbaikan tata kelola, dukungan pimpinan maupun adanya

kolaborasi yang baik antara stakeholder terkait. Sementara untuk faktor penghambat berasal dari keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM dan ketersediaan anggaran terkait dengan pemenuhan kebutuhan Infrastruktur Teknologi.

## 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti guna perbaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang di tahun selanjutnya, diantaranya:

1. Perlunya komitmen, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan SPBE sebagai program strategis Nasional dan Daerah antara pimpinan dan stakeholder terkait.
2. Perlunya penyesuaian tatakelola yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.
3. Peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM.
4. Penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi sesuai dengan kebutuhan percepatan Transformasi Digital Pemerintah daerah.
5. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan OPD/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Padang Panjang, 20 Februari 2026

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KOTA PADANG PANJANG**



**HARRY RIZKA PERDANA, S.IP, M.Si**  
**NIP. 19871004 200701 1 002**